

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad.1847-23

Ketetapan MPR No. XVI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9844)

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 152)

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan ekowisata (*ecotourism*) Di Daerah

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

DAFTAR TABEL

Tabel I Pergeseran Paradigma dan Strategi Pembangunan Kepariwisata	74
Tabel II Karakteristik Perjanjian Kemitraan	137

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
SAMPUL DALAM	i
PROMOTOR dan KO-PROMOTOR	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI	v
PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	xiii
SUMMARY	xvi
ABSTRACT	xix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Orisinalitas Penelitian	15
1.6. Kerangka Teoritik dan Konseptual	18

1.6.1. Pengertian Ekowisata (<i>ecotourism</i>)	18
1.6.2. Konsep Kemitraan	24
1.6.3. Teori Keadilan	29
1.6.4. Teori Negara Kesejahteraan	38
1.6.5. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak	41
1.7. Metode Penelitian	53
1.7.1. Tipe Penelitian	53
1.7.2. Pendekatan Masalah	55
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	56
1.8. Sistematika Penelitian	60
BAB II HAKIKAT KEMITRAAN DI BIDANG	
EKOWISATA (<i>ECOTOURISM</i>)	63
2.1. Ekowisata (<i>ecotourism</i>) Sebagai Pilar Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro	63
2.2. Kebijakan Kemitraan UMKM di bidang Ekowisata (<i>ecotourism</i>)	100
BAB III KARAKTERISTIK PERJANJIAN KEMITRAAN	
DI BIDANG EKOWISATA (<i>ECOTOURISM</i>)	133
3.1. Perjanjian Kemitraan di Bidang Ekowisata (<i>ecotourism</i>)	133
3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Larangan dalam Perjanjian Kemitraan di Bidang Ekowisata (<i>ecotourism</i>)	196

BAB IV PRINSIP SOLIDARITAS EKONOMI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DI BIDANG EKOWISATA (<i>ECOTOURISM</i>)	207
4.1. Prinsip Solidaritas Ekonomi Sebagai Landasan Perjanjian Kemitraan di Bidang Ekowisata (<i>ecotourism</i>)	207
4.2. Formulasi Prinsip Solidaritas Ekonomi dalam Perjanjian Kemitraan di Bidang Ekowisata (<i>Ecotourism</i>)	265
BAB V PENUTUP	283
5.1. Kesimpulan	288
5.2. Saran	290
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	